

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP OPERASIONAL

A. Teori

1. Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Sistem Pengelolaan

Ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu *systema*. Artinya, sehimpunan dari bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.⁵ Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan-pecahan kaca tanpa ada kaitan, maka sebuah sistem terdiri dari pecahan-pecahan subsistem yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan.

Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem kemudian terus berkembang dan menunjuk pada berbagai arti. *Pertama*, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun, terorganisasi dan membentuk suatu kesatuan yang logis. *Kedua*, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sekelompok atau sehimpunan dari benda-benda tertentu yang memiliki hubungan secara khusus. Dan *ketiga*, pengertian sistem yang digunakan dalam arti metode atau tata cara.

⁵ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2010. Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta : Kencana. Hlm. 123

Menurut Richard A. Jhosnson dan James E. Rosanzweing dalam bukunya yang berjudul *the theory and manajemen of system*, yang diterjemahkan oleh S. Pamudji dalam bukunya teori sistem dan penerapannya dalam manajemen, mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan/perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh.⁶

Teori sistem menurut Gordon B. Davis organisasi dipandang sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan.⁷

Sifat-sifat dari suatu sistem antara lain :

- 1) Pencapaian tujuan, orientasi pencapaian tujuan akan memberikan sifat dinamis kepada sistem, memberi ciri perubahan yang terus-menerus dalam usaha mencapai tujuan.
- 2) Kesatuan usaha, mencerminkan suatu sifat dasar dari sistem dimana hasil keseluruhan melebihi dari jumlah bagian-bagian atau sering disebut konsep sinergi.
- 3) Keterbukaan terhadap lingkungan, lingkungan merupakan sumber kesempatan maupun hambatan pengembangan.
- 4) Transformasi, merupakan proses perubahan input menjadi output yang dilakukan oleh sistem.

⁶ Moekijat, 1994, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, Bandung : PT. Remaja Rosdakaya, , hlm.3

⁷ AM. Kadarah, Jusuf Udaya, 1996, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 36

- 5) Hubungan antar bagian, kaitan antara subsistem inilah yang akan memberikan analisa sistem suatu dasar pemahaman yang lebih luas.⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem adalah sehimpunan gagasan atau komponen yang mana semua itu membentuk atau yang membentuk suatu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain.

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen, secara etimologis berasal dari kata ‘kelola’ (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana prajudi mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu kerja tertentu.

Menurut Balderton, mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, megorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Moekijat mengemukakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁸ Marimin, 2005, *Teori dan Aplikasi sistem pakar dalam teknologi Manajemen*, Bogor : IPB Press.

kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.⁹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena di dalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam pengelolaan terdapat fungsi-fungsi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Menurut George R Terry fungsi manajemen ada 4 (empat) yang terdiri dari planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), controlling (pengawasan) sampai pada proses terwujudnya tujuan.

1) Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Prinsip perencanaan selalu berusaha menyertakan anggota-anggota dari berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam membuat suatu perencanaan harus benar-benar melihat sikon dan kondisi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang karena perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi.

⁹ Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Graha Ilmu. Hlm. 21.

Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan agar resiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah “memilih” artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Perencanaan merupakan sekumpulan dari beberapa keputusan.¹⁰

2) Organizing (pengorganisasian)

Fungsi manajemen selanjutnya adalah pengorganisasian. George R Terry mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, dan tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan.¹¹

¹⁰ Melayu S.P Hasibuan. 2006. *MANAJEMEN : Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 91.

¹¹¹¹ M. Ali Zasri, 2008, *Dasar-Dasar Manajemen*, Pekanbaru : Suska Press.

3) Actuating (pelaksanaan)

George R Terry mengemukakan bahwa Actuating merupakan penggerak anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran usaha yang diinginkan. Atau keseluruhan usaha, cara, teknik, metode untuk mendorong anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi mencapai tujuan organisasi yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika:

- a) Merasa yakin akan mampu mengerjakan,
- b) Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya,
- c) Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak,
- d) Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan,
- e) Hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Controlling (pengawasan)

Pengawasan adalah kegiatan yang melihat konsekuensi kebijakan tertentu, bagaimana dan seberapa jauh hasil yang terjadi.¹² Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil atau dampak. Artinya kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pengelolaan terdapat prinsip manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai pada terwujudnya suatu tujuan yang diinginkan.

b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Ciri Utama BUMDes dengan Lembaga Ekonomi Komersil lainnya, sebagai berikut:

- a) Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama.
- b) Modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyerataan modal (Saham atau andil).

¹². Amri Marjali, dkk. 2002. Pengelolaan Lingkungan Sosial. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hlm.91

- c) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.
- d) Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar.
- e) Keuntungan yang di peroleh di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Penyetara Modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- f) Difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa.
- g) Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan Anggota).¹³

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut azas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman dari pihak luar seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Adapun empat tujuan dalam utama pendirian BUMDes adalah sebagai berikut¹⁴ :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa

¹³ Dapertemen Pendidikan Nasional, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 2007.

¹⁴ BPPM Propinsi Riau, 2009, Petunjuk Teknis Progam Pemberdayaan Desa (PPD).

3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes mejadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produksif desa yang dilakukan secara Koorperatif, Partisifatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustaniabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien dan profesional.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Adapun yang dimaksud dengan ‘kebutuhan’ dan ‘potensi desa’ adalah¹⁵ :

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- b. Tersedianya sumberdaya manusia yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan uasaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat

¹⁵ Opcit,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat.

Adapun LANDASAN DASAR HUKUM PENDIRIAN BUMDES DILANDASI OLEH UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PP NO. 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah¹⁶ :

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78

- 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

- 1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- 2) 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

¹⁶ Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah Desa;
 - b) Tabungan masyarakat;
 - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - d) Pinjaman; dan/atau
 - e) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- 4) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah desa dan masyarakat.

Pasal 80

- 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan
- 2) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan
- 3) Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Bentuk badan hukum;
 - b) Kepengurusan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Hak dan kewajiban;
- d) Permodalan;
- e) Bagi hasil usaha atau keuntungan;
- f) Kerjasama dengan pihak ketiga;
- g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Adapun bentuk usaha yang dapat dijalankan dalam BUMDes adalah sebagai berikut¹⁷ :

1. Pasar desa
2. Simpan pinjam
3. Waserda
4. Sumber air
5. Transportasi
6. Obyek wisata desa
7. Home industri
8. Kerajinan rakyat
9. Perikanan darat
10. Peternakan
11. Pertanian
12. Agroindustri

Adapun karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapatkan pelayanan utama BUMDes adalah :

¹⁷ Opcit, 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang, papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal.
2. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya.
3. Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ketangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat.
4. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk menekan bunga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa.

Prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu sebagai berikut¹⁸ :

- 1) *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

¹⁸Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD), 2011, Pemerintah Propinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
- 4) *Transparan*, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) *Akuntebel*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) *Sustainebel*, kegiatan usaha harus dapat di kembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerja sama (*Cooperatif*), membangun kebersamaan dan menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

2. Peningkatan Ekonomi

Adam Smith menguraikan kehidupan ekonomi secara keseluruhan serta menunjukkan bagaimana semua itu berhubungan satu sama lain. Sejak itu jumlah pemikir ekonomi bertambah banyak, dan akhirnya ilmu ekonomi mengalami perkembangan yang pesat sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri. Adam Smith menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Bidang yang dipelajari oleh ilmu ekonomi sangat luas, yaitu tentang

tingkah laku manusia dalam masyarakat, dalam usahanya mencari nafkah dan segala apa yang berhubungan dengan itu.

Menurut ahli ekonomi lainnya, yaitu J.L. Meij mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang usaha manusia ke arah kemakmuran.¹⁹ Pendapat tersebut sangat realistis karena ditinjau dari aspek ekonomi di mana manusia sebagai makhluk ekonomi (*Homo Economicus*), pada hakikatnya mengarah pada pencapaian kemakmuran. Kemakmuran menjadi tujuan sentral dalam kehidupan manusia secara ekonomi.

Pembangunan jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, maka keberhasilan pembangunan dapat diukur dari peningkatan pendapatan nasional ataupun dari pendapatan nasional perkapita. Pendapatan nasional bruto dan pendapatan nasional perkapita yang mana merupakan indikator pembangunan.²⁰

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi :

1. Sumber daya alam

Yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi.

¹⁹Dadang, Supardan, 2013, *Pengantar Ilmu Sosial, Sebuah Kajian Pendekatan Struktura*, Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 366.

²⁰Subandi, 2014, *Ekonomi Pembangunan*, Bandung : Alfabeta, hlm. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktifitas yang ada.

3. Sumber daya modal

Modal adalah sejumlah harga (uang/barang) yang dipergunakan untuk menjalankan suatu usaha, modal berupa uang tunai, barang dagangan bangunan dan lain sebagainya. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengelola kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas

4. Keahlian atau kewirausahaan

Keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengelola bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).

Adapun Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi, Menurut Jhingan (2004:142-149), ia membedakan adanya lima tahapan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masyarakat tradisional

Masyarakat tradisional diartikan sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang disepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi.

2. Prasyarat tinggal landas

Tahap ini merupakan masa tradisi dimana prasyarat-prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan.

3. Tinggal landas

Tahap ini merupakan titik yang menentukan didalam kehidupan suatu masyarakat 'ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya, kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga-lembaga.

4. Era konsumsi massa besar-besaran

Abad konsumsi massa besar-besaran ditandai dengan migrasi kepinggiran kota, pemakaian mobil secara luas, barang konsumsi dan peralatan rumah tangga yang tahan lama.

Menurut N.Gregory Mankiw ilmu ekonomi pada dasarnya studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Pada sebagian besar masyarakat, sumber daya bukan dialokasikan oleh sebuah pelaku perencanaan tunggal, melainkan oleh jutaan unit atau pelaku ekonomi yang terdiri dari sekian banyak rumah tangga dan perusahaan.

Di dalam ilmu ekonomi juga menggunakan mazhab klasik yang mana pada hakikatnya, inti mazhab klasik terletak pada gagasan bahwa

pertumbuhan ekonomi berlangsung melalui interaksi antara akumulasi modal dan pembagian kerja. Akumulasi modal dapat dilakukan dengan menunda atau pengurangi penjualan *output*. Hal ini baru akan bermanfaat jika dibarengi dengan pengembangan spesialisasi dan pembagian kerja. Pembagian kerja itu sendiri nantinya akan dapat meningkatkan *total output* sehingga memudahkan dilakukanya akumulasi modal lebih lanjut. Jadi, jelaslah bahwa hubungan tersebut terdapat hubungan tibal balik yang sangat penting.²¹ Pertumbuhan hanya dapat ditingkatkan jika modal dapat ditambah dan alokasi sumber daya (pembagian kerja) dapat disempurnakan. Namun pembagian kerja itu sendiri dibatasi oleh ukuran atau skala pasar yang pada giliranya ditentukan oleh jumlah penduduk dan pendapatan perkapita yang ada.

Di dalam sistem perekonomian yang berazaskan kekeluargaan untuk menuju pemerataan dan kesejahteraan rakyat, kemiskinan perlu ditanggulangi karena bisa menghambat pembangunan. Dalam rangka menanggulangi kemiskinan ini dianjurkan sebagai kewajiban yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu, Kewajiban individu, Kewajiban orang lain atau masyarakat, dan Kewajiban pemerintah.

Menurut Al Siti Farida (2011:56-63), daerah dikatakan maju atau tidaknya ditinjau dari keadaan ekonomi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi perkembangan dan kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari parameter-parameter berikut :

- a) Pendapatan perkapita
- b) Tingkat pertumbuhan ekonomi

²¹ Ibid, hlm. 395

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Ketersediaan modal
- d) Pemanfaatan SDA
- e) Pertumbuhan penduduk
- f) Kepadatan penduduk
- g) Tingkat pengangguran
- h) Kemajuan teknologi

B. Kajian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Alvan, tahun 2017 No 201764pmi Fakultas Dakwah, dengan judul “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ”Berkah Bersama” Dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*”. Dengan hasil penelitian bahwa peran BUMDes yaitu, *Pertama* : menggali potensi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), *kedua* : pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro, *ketiga* : membantu dana simpan pinjam pada masyarakat, *keempat* : memberikan bimbingan teknis serta wadah dalam menggerakkan kesadaran masyarakat terhadap peluang pemberdayaan masyarakat, *kelima* : mengadakan Musyawarah Desa dan Pertanggungjawaban Tahunan (MDPT) sekaligus membantu masyarakat yang tergolong fakir miskin. Program-program yang dibuat oleh BUMDes bertujuan agar masyarakat yang tergolong rumah tangga miskin mampu meningkatkan pendapatan keluarganya dan mengembangkan usahanya, serta menggali potensi desa dan meningkatkan pendapatan asli desa.

Adapun alasan penulis untuk melakukan penelitian tentang sistem pengelolaan BUMDes dalam peningkatan ekonomi nasabah di Desa Belutu yaitu, penelitian ini mempunyai permasalahan yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah terjadinya tunggakan yang besar, pihak pemanfaat yang menggunakan dana pinjaman bukan untuk usahanya melainkan untuk keperluan lainnya, serta tempat penelitian ini dilakukan pada BUMDes Garut Sejahtera di Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan konsep yang memberikan batasan kepada kerangka teoritis, selain itu untuk menentukan ukuran secara spesifikasi dan teratur agar mudah dipahami untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap penulisan peningkatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya penulis merumuskan konsep operasional sebagai tolak ukur atau indikator dalam penelitian ini. Adapun konsep operasional yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sistem pengelolaan BUMDes dan Peningkatan Perekonomian nasabah

Sistem pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen yang mana didalamnya terdapat fungsi manajemen yaitu *Planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), *controlling* (pengawasan) dalam kegiatan simpan pinjam. Jadi sistem pengelolaan yang dilakukan BUMDes dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang

dilakukan oleh BUMDes untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu adanya peningkatan pendapatan yang dirasakan masyarakat dan tidak terjadinya kredit macet.

Peningkatan Perekonomian nasabah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah nasabah yang perekonomiannya lemah dalam modal dan berpenghasilan rendah yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha, didasari oleh potensi sumber daya yang ada dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam segi ekonomi.

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat

Sedangkan variabel pengikat (Y) dalam penelitian ini adalah tingkat pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh BUMDes.

Adapun indikator sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian nasabah sebagai berikut :

1. Sistem pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes, adapun indikatornya :
 - a. Merencanakan penyusunan rencana usaha simpan pinjam
 - b. Membangun kesepakatan antar masyarakat dan pemerintah desa
 - c. Membuat peraturan organisasi yang mengacu kepada rumusan musyawarah desa
 - d. Memahami aturan kerja organisasi sesuai dengan prinsip tata kelola BUMDes

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dengan modal yang sebagian dimiliki oleh BUMDes
 - f. Melakukan pengawasan terhadap dana yang digulirkan
2. Peningkatan Perekonomian Nasabah, adapun indikator :
 - a. Memberikan modal kepada anggota
 - b. Membuka lapangan kerja baru bagi nasabah
 - c. Meningkatkan pendapatan nasabah
 - d. Mempermudah nasabah untuk menabung
 - e. Menjelaskan peluang-peluang usaha peningkatan pendapatan nasabah

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dalam penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.²²

Hipoesis adalah dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya dalam menerangkan fakta-fakta atau kondisi yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk langkah selanjutnya.

²² Sugiono , 2016, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* , Bandung : Alfabeta, hlm. 64.

Sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi nasabah yaitu apabila sistem pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang lemah dalam modal dan berpenghasilan rendah dan tidak terjadinya kredit macet yang mana modal yang diberikan dapat terus bergulir.

Dari kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ha: Terdapat hubungan yang signifikan antara sistem pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes dalam meningkatkan perekonomian nasabah di desa belutu kecamatan kandis kabupaten siak

Ho : Tidak teradapat hubungan yang signifikan antara sistem pengelolaan yang di lakukan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian nasabah di desa belutu kecamatan kandis kabupaten siak

Kaidah pengujian signifikansi :

- a. Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, maka H_0 ditolak artinya signifikan
- b. Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$, maka H_0 diterima artinya tidak signifika dengan taraf signifikan : $\bar{\alpha} = 5\%$ atau 0.05.